



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PERTANAHAN
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
TANGGAL 26 – 28 MARET 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pertanian yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanian Kementerian ATR/BPN Ijas Tedjo Prijono, SH. yang menjadi mitra Komisi II DPR RI.

Berbagai pengaduan yang diterima oleh Komisi II DPR RI tidak hanya terkait dengan konflik ataupun sengketa tanah yang terjadi, tapi juga berkaitan dengan kinerja BPN yang merupakan garda terdepan dalam menangani berbagai persoalan pertanian yang terjadi di Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap urusan keagrariaan atau pertanian di Indonesia, Kementerian ATR/BPN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, namun di sisi lain harus tetap bekerja sesuai dengan koridor sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN juga memiliki tugas penting terkait pelaksanaan program-program pertanian yang menjadi prioritas, seperti antara lain masalah pensertifikatan, pemetaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang & tanah, penanganan akses reform, hingga penanganan kasus-kasus pertanian. Pelaksanaan program-program pertanian yang menjadi prioritas tersebut hanya dapat terimplementasi dengan baik oleh Kementerian ATR/BPN apabila didukung oleh seluruh jajarannya di daerah, termasuk dukungan infrastruktur keagrariaan yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selalu berupaya mendukung sekaligus mengawasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN agar senantiasa dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program-program prioritas maupun dalam menangani berbagai masalah pertanian yang ada.

Dalam paparannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Darman Satia Halomoan Simanjuntak menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Bekasi sedang melakukan proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2023. Persetujuan substansi RDTR di Kabupaten Bekasi terdapat di 4 Wilayah Perencanaan (WP) yaitu: WP Cikarang Bekasi Laut, WP Cikarang Barat dan Cibitung, WP Cikarang Pusat, Cikarang Utara, dan Cikarang Selatan, dan WP Tambun Utara dan Tambun Selatan. Terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Bekasi merupakan penyumbang terbesar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 akan ada kegiatan pembaruan peta ZNT di 200 titik di Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2023, pemetaan bidang tanah di Kabupaten Bekasi mencapai 102,42% dari target luas bidang tanah 9.883,0000 Ha dengan realisasi mencapai 10.122,6200 Ha. Sedangkan untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah tahun 2024 baru mencapai 5,77% atau 2.886 bidang tanah K1 dengan target 10.000 bidang tanah hingga beberapa bulan ke depan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu dari 104 kab/kota yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai prioritas program pendaftaran tanah kab/kota lengkap hingga akhir 2024.

Selain itu, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, SH. memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas tercapainya PTSL melebihi 100% dan mensyukuri bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tidak ada aparat BPN yang terkena kasus hukum. Kinerja aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik hal ini juga dibuktikan dengan diberikannya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB. Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, diharapkan ke depan lebih ditekankan pada upaya menemukan strategi untuk mengatasi berbagai masalah seperti tumpang tindih lahan dan posisi tanah yang tidak sesuai dengan keberadaan sebenarnya. Mengingat nantinya peta bidang tanah akan terdata secara digital.

Dari hasil pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terkait beberapa hal berikut:
 - a. Ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai serta inovasi pelayanan administrasi pertanahan yang prima, transparan, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - b. Tercapainya pemetaan bidang tanah di Kabupaten Bekasi yang melebihi target 102,42%.

Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat menjadi contoh teladan bagi kantor pertanahan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

2. Komisi II DPR RI mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menyelesaikan target penerbitan sertipikat hak atas tanah pada tahun 2024 agar prioritas program pendaftaran tanah kabupaten lengkap tercapai.
3. Terhadap maraknya alih fungsi lahan terutama dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi bangunan dan kawasan industri yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Komisi II DPR RI meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi memperhatikan pentingnya menjaga kesesuaian antara RTRW nasional dalam penyusunan RDTR serta menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi.
4. Komisi II DPR RI meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan program prioritas nasional di bidang pertanahan (bidang tanah yang tumpang tindih, bidang tanah yang tidak sesuai dengan lokasi sesungguhnya, dan lain-lain) agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
5. Komisi II mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi meningkatkan kualitas dan kompetensi juru ukur berlisensi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar produk pendaftaran tanah yang dihasilkan dapat berkualitas pula.

Kabupaten Bekasi, 26 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.